



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG PADA
SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rekening Kas Lembang adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Jumlah Lembang adalah jumlah Lembang yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disingkat APBLembang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG

Pasal 2

Rincian Dana Lembang setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah lembang sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Lembang Tertinggal dan Lembang Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Lembang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Lembang} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$$AA \text{ per Desa} = \text{Alokasi Afirmasi per Desa}$$

- AA_{Kab/kota} = Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019
- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Lembang Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Lembang.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Lembang Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Lembang.
- (5) Lembang Tertinggal dan Lembang Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Lembang Tertinggal dan Lembang Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Lembang

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Lembang terhadap total penduduk Lembang.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Lembang terhadap total penduduk miskin Lembang Kabupaten Toraja Utara.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Lembang terhadap total luas wilayah Lembang Kabupaten Toraja Utara.
- Z4 = rasio IKG setiap Lembang terhadap IKG Lembang Kabupaten Toraja Utara.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Lembang untuk setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA LEMBANG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Lembang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Lembang (RKL).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke RKL dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana Lembang diterima di RKL setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran dana Lembang dari RKUD ke RKL tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:

- a. peraturan lembang mengenai APB Lembang; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Lembang.
- (4) Penyaluran dana lembang dari RKUD ke RKL tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang tahap I dari Kepala Lembang.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Lembang dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA LEMBANG

Pasal 10

- (1) Dana Lembang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas bidang produk unggulan lembang, kawasan perdesaan, BUMLem, embung dan sarana olahraga Lembang (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).

- (2) Dana Lembang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Lembang mengenai APB Lembang.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Lembang berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Lembang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Lembang diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Lembang setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Lembang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Lembang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Lembang.

BAB V

PELAPORAN DANA LEMBANG

Pasal 13

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang tahap I.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Januari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Lembang dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Toraja Utara.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Lembang, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat sisa dana desa di RKL Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Lembang tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Lembang yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Lembang tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%

(tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Lembang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Lembang di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Lembang yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Lembang.
- (6) Dana Lembang yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Lembang.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Lembang yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Lembang di RKL tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Lembang tidak dapat disalurkan lagi ke RKL dan menjadi sisa Dana Lembang di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Lembang di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Lembang.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Lembang yang bersangkutan mengenai Dana Lembang yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Lembang tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Lembang di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Lembang telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Lembang tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Lembang paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Lembang dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Lembang di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Lembang tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Setiap Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

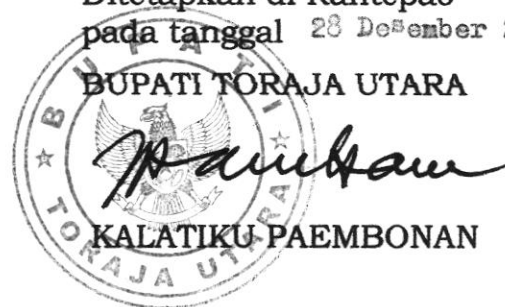
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

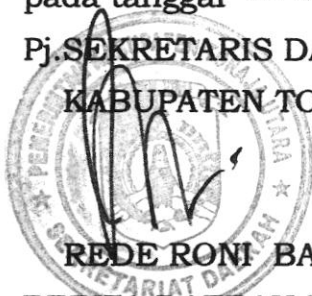
Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TORAJA UTARA



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 53 TAHUN 2018

TANGGAL 28 DESEMBER 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019


**RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG
DI KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA LEMBANG
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
I	KECAMATAN SOPAI				
1	Tombang Langda	672,421,000	211,289,000	255,934,000	1,139,644,000
2	Langda	672,421,000	211,289,000	302,261,000	1,185,971,000
3	Nonongan Selatan	672,421,000	-	287,716,000	960,137,000
4	Marante	672,421,000	211,289,000	322,100,000	1,205,810,000
5	Salu Sopai	672,421,000	211,289,000	234,734,000	1,118,444,000
6	Salu Sarre	672,421,000	211,289,000	275,721,000	1,159,431,000
7	Salu	672,421,000	211,289,000	656,115,000	1,539,825,000
	Jumlah I	4,706,947,000	1,267,734,000	2,334,581,000	8,309,262,000
II	KECAMATAN KESU'				
1	Sangbua'	672,421,000	-	145,917,000	818,338,000
2	Tadongkon	672,421,000	-	219,661,000	892,082,000
3	Angin Angin	672,421,000	211,289,000	329,422,000	1,213,132,000
4	Tallu Lolo	672,421,000	-	230,409,000	902,830,000
5	Rinding Batu	672,421,000	-	281,932,000	954,353,000
	Jumlah II	3,362,105,000	211,289,000	1,207,341,000	4,780,735,000
III	KECAMATAN SANGGALANGI				
1	Tallung Penanian	672,421,000	211,289,000	308,057,000	1,191,767,000
2	Pata'padang	672,421,000	211,289,000	408,407,000	1,292,117,000
3	Buntu La'bo'	672,421,000	-	358,212,000	1,030,633,000
4	Tandung La'bo'	672,421,000	211,289,000	396,288,000	1,279,998,000
5	La'bo'	672,421,000	211,289,000	450,939,000	1,334,649,000
	Jumlah III	3,362,105,000	845,156,000	1,921,903,000	6,129,164,000
IV	KECAMATAN BUNTAO'				
1	Sapan Kua-Kua	672,421,000	211,289,000	500,196,000	1,383,906,000
2	Misa Ba'bana	672,421,000	211,289,000	284,230,000	1,167,940,000
3	Rinding Kila' Balabatu	672,421,000	211,289,000	569,703,000	1,453,413,000
4	Issong Kalua	672,421,000	211,289,000	475,686,000	1,359,396,000
	Jumlah IV	2,689,684,000	845,156,000	1,829,815,000	5,364,655,000
V	KECAMATAN RANTEBUA				
1	Rantebua Sanggalangi	672,421,000	422,578,000	473,995,000	1,568,994,000
2	Rantebua Sumalu	672,421,000	211,289,000	385,883,000	1,269,593,000
3	Rantebua	672,421,000	211,289,000	389,474,000	1,273,184,000
4	Makkuan Pare	672,421,000	211,289,000	283,210,000	1,166,920,000
5	Pitung Penanian	672,421,000	211,289,000	361,530,000	1,245,240,000
	Jumlah V	3,362,105,000	1,267,734,000	1,894,092,000	6,523,931,000
VI	KECAMATAN NANGGALA				
1	Rante	672,421,000	211,289,000	204,417,000	1,088,127,000
2	Karre Penanian	672,421,000	211,289,000	284,674,000	1,168,384,000
3	Karre Limbong	672,421,000	422,578,000	336,409,000	1,431,408,000
4	Nanna Nanggala	672,421,000	211,289,000	254,709,000	1,138,419,000
5	Basokan	672,421,000	211,289,000	256,311,000	1,140,021,000
6	Nanggala	672,421,000	211,289,000	280,920,000	1,164,630,000

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA LEMBANG
7	Tandung Nanggala	672,421,000	211,289,000	245,235,000	1,128,945,000
8	Lili' Kira'	672,421,000	-	200,557,000	872,978,000
	Jumlah VI	5,379,368,000	1,690,312,000	2,063,232,000	9,132,912,000
VII	KECAMATAN TONDON				
1	Tondon	672,421,000	-	458,948,000	1,131,369,000
2	Tondon Matallo	672,421,000	211,289,000	551,719,000	1,435,429,000
3	Tondon Langi	672,421,000	211,289,000	446,697,000	1,330,407,000
4	Tondon Siba'ta	672,421,000	211,289,000	420,245,000	1,303,955,000
	Jumlah VII	2,689,684,000	633,867,000	1,877,609,000	5,201,160,000
VIII	KECAMATAN TALLUNGLIPU				
1	Buntu Tallunglipu	672,421,000	-	205,150,000	877,571,000
	Jumlah VIII	672,421,000	-	205,150,000	877,571,000
IX	KECAMATAN RANTEPAO				
1	Saloso	672,421,000	-	278,919,000	951,340,000
2	Limbong	672,421,000	-	162,294,000	834,715,000
	Jumlah IX	1,344,842,000	-	441,213,000	1,786,055,000
X	KECAMATAN TIKALA				
1	Sereale	672,421,000	211,289,000	276,891,000	1,160,601,000
2	Buntu Batu	672,421,000	211,289,000	276,979,000	1,160,689,000
3	Embatau	672,421,000	211,289,000	353,248,000	1,236,958,000
4	Benteng Ka'do To'ria	672,421,000	422,578,000	252,030,000	1,347,029,000
5	Pangden	672,421,000	211,289,000	280,824,000	1,164,534,000
	Jumlah X	3,362,105,000	1,267,734,000	1,439,972,000	6,069,811,000
XI	KECAMATAN SESEAN				
1	Buntu Lobo'	672,421,000	211,289,000	414,257,000	1,297,967,000
2	Parinding	672,421,000	211,289,000	267,793,000	1,151,503,000
3	Bori Rante Letok	672,421,000	-	405,693,000	1,078,114,000
4	Bori' Lombongan	672,421,000	-	199,625,000	872,046,000
	Jumlah XI	2,689,684,000	422,578,000	1,287,368,000	4,399,630,000
XII	KECAMATAN BALUSU				
1	Palangi'	672,421,000	211,289,000	265,669,000	1,149,379,000
2	Karua	672,421,000	211,289,000	294,279,000	1,177,989,000
3	Lilikira Ao'gading	672,421,000	-	191,826,000	864,247,000
4	Balusu Bangun Lipu	672,421,000	211,289,000	495,822,000	1,379,532,000
5	Awak Kawasik	672,421,000	-	163,050,000	835,471,000
	Jumlah XII	3,362,105,000	633,867,000	1,410,646,000	5,406,618,000
XIII	KECAMATAN SA'DAN				
1	Sa'dan Andulan	672,421,000	211,289,000	243,246,000	1,126,956,000
2	Sa'dan Tiroallo	672,421,000	211,289,000	387,111,000	1,270,821,000
3	Sangkaropi	672,421,000	211,289,000	390,214,000	1,273,924,000
4	Sa'dan Pebulian	672,421,000	211,289,000	359,322,000	1,243,032,000
5	Sa'dan Ballo Pasange	672,421,000	211,289,000	324,137,000	1,207,847,000
6	Sa'dan Likulambe'	672,421,000	422,578,000	501,081,000	1,596,080,000
7	Sa'dan Pesondongan	672,421,000	422,578,000	499,375,000	1,594,374,000
8	Sa'dan Ulsalu	672,421,000	422,578,000	729,616,000	1,824,615,000
	Jumlah XIII	5,379,368,000	2,324,179,000	3,434,102,000	11,137,649,000
XIV	KECAMATAN BANGKELEKILA'				
1	Toyasa Akung	672,421,000	211,289,000	247,531,000	1,131,241,000
2	Batu Limbong	672,421,000	211,289,000	380,377,000	1,264,087,000
3	Bangkelekila	672,421,000	-	210,693,000	883,114,000
4	Tampam Bonga	672,421,000	211,289,000	335,496,000	1,219,206,000
	Jumlah XIV	2,689,684,000	633,867,000	1,174,097,000	4,497,648,000

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA LEMBAH
XV	KECAMATAN SULOARA'				
1	Tonga Riu	672,421,000	211,289,000	268,815,000	1,152,525,000
2	Landorundun	672,421,000	-	178,972,000	851,393,000
3	Suloara	672,421,000	-	459,589,000	1,132,010,000
4	Sesean Matallo	672,421,000	211,289,000	246,104,000	1,129,814,000
5	Lempo	672,421,000	211,289,000	302,838,000	1,186,548,000
	Jumlah XV	3,362,105,000	633,867,000	1,456,318,000	5,452,290,000
XVI	KECAMATAN KAPALAPITU				
1	Benteng Mamullu	672,421,000	211,289,000	351,246,000	1,234,956,000
2	Kapalapitu	672,421,000	-	214,244,000	886,665,000
3	Kantun Poya	672,421,000	211,289,000	280,962,000	1,164,672,000
4	Benteng Ka'do	672,421,000	211,289,000	384,449,000	1,268,159,000
5	Sikuku'	672,421,000	211,289,000	293,201,000	1,176,911,000
6	Polo Padang	672,421,000	211,289,000	260,962,000	1,144,672,000
	Jumlah XVI	4,034,526,000	1,056,445,000	1,785,064,000	6,876,035,000
XVII	KECAMATAN DENPINA				
1	Kapolang	672,421,000	211,289,000	367,297,000	1,251,007,000
2	Piongan	672,421,000	211,289,000	290,027,000	1,173,737,000
3	Dende	672,421,000	211,289,000	389,817,000	1,273,527,000
4	Paku	672,421,000	211,289,000	275,584,000	1,159,294,000
5	Ma'dong	672,421,000	211,289,000	305,521,000	1,189,231,000
6	Buntu Tagari	672,421,000	211,289,000	390,110,000	1,273,820,000
7	Parinding	672,421,000	211,289,000	298,030,000	1,181,740,000
	Jumlah XVII	4,706,947,000	1,479,023,000	2,316,386,000	8,502,356,000
XVIII	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA				
1	Batu Lotong	672,421,000	211,289,000	432,092,000	1,315,802,000
2	Awan	672,421,000	211,289,000	331,809,000	1,215,519,000
3	Londong Biang	672,421,000	211,289,000	539,054,000	1,422,764,000
4	Buntu Karua	672,421,000	211,289,000	591,141,000	1,474,851,000
	Jumlah XVIII	2,689,684,000	845,156,000	1,894,096,000	5,428,936,000
XIX	KECAMATAN RINDINGALLO				
1	Buntu Batu	672,421,000	211,289,000	249,414,000	1,133,124,000
2	Ampang Batu	672,421,000	211,289,000	328,139,000	1,211,849,000
3	Mai'ting	672,421,000	211,289,000	299,202,000	1,182,912,000
4	Lo'ko Uru Tanete Batu	672,421,000	211,289,000	325,284,000	1,208,994,000
5	Rindingallo	672,421,000	211,289,000	381,650,000	1,265,360,000
6	Bulu Langkan	672,421,000	211,289,000	365,519,000	1,249,229,000
7	Lempo Poton	672,421,000	211,289,000	355,204,000	1,238,914,000
	Jumlah XIX	4,706,947,000	1,479,023,000	2,304,412,000	8,490,382,000
XX	KECAMATAN BUNTU PEPASAN				
1	Parandangan	672,421,000	211,289,000	275,434,000	1,159,144,000
2	Buntu Minanga	672,421,000	211,289,000	284,806,000	1,168,516,000
3	Sarambu	672,421,000	211,289,000	373,560,000	1,257,270,000
4	Rante Uma	672,421,000	211,289,000	340,638,000	1,224,348,000
5	Pulu'-Pulu'	672,421,000	211,289,000	468,750,000	1,352,460,000
6	Pengkaroan Manuk	672,421,000	211,289,000	293,370,000	1,177,080,000
7	Batu Busa	672,421,000	211,289,000	304,731,000	1,188,441,000
8	Roroan Barra'-Barra'	672,421,000	211,289,000	296,225,000	1,179,935,000
9	Pangkung Batu	672,421,000	211,289,000	355,780,000	1,239,490,000
10	Ponglu	672,421,000	422,578,000	369,553,000	1,464,552,000
11	Paongan	672,421,000	211,289,000	340,545,000	1,224,255,000
12	Talimbangan	672,421,000	211,289,000	414,558,000	1,298,268,000
	Jumlah XX	8,069,052,000	2,746,757,000	4,117,950,000	14,933,759,000

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA LEMBANG
XXI	KECAMATAN BARUPPU'				
1	Benteng Batu	672,421,000	211,289,000	520,826,000	1,404,536,000
2	Baruppu' Utara	672,421,000	211,289,000	502,732,000	1,386,442,000
3	Baruppu' Parodo	672,421,000	422,578,000	731,778,000	1,826,777,000
	Jumlah XXI	2,017,263,000	845,156,000	1,755,336,000	4,617,755,000
	TOTAL	74,638,731,000	21,128,900,000	38,150,683,000	133,918,314,000


 BUPATI TORAJA UTARA,
Maubae
 KALATIKU PAEMBONAN